

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pariwisata merupakan sektor yang penting dalam perekonomian sebagai sumber perekonomian Negara dan masyarakat, pengembangan sosial budaya dan mempromosikan citra bangsa diluar negeri. Keberhasilan pembangunan sektor pariwisata akan turut menentukan keberhasilan pembangunan Nasional, karena pembangunan sektor pariwisata merupakan bagian dari pembangunan Nasional, dan terkait dengan pembangunan lainnya.

Pemerintah telah berusaha keras untuk meningkatkan pengembangan pariwisata Nasional sebagai sektor pembangunan yang dapat diandalkan untuk dapat meningkatkan penerimaan devisa, memperluas kesempatan kerja dan lapangan usaha, mendorong pembangunan daerah dan meningkatkan kegiatan ekonomi, memperkenalkan alam dan nilai-nilai budaya bangsa serta memupuk cinta tanah air.

Sektor pariwisata meliputi beberapa bidang usaha seperti : hotel dan restoran, biro perjalanan wisata dan kawasan wisata. Pariwisata merupakan sektor yang melibatkan sektor lain sehingga koordinasi sangat penting. Pembangunan di sektor pariwisata ini akan melibatkan semua

lapisan masyarakat. Mulai dari lapisan atas hingga lapisan bawah. Baik kalangan pemerintah, swasta maupun kalangan masyarakat biasa. Partisipasi masyarakat disekitar obyek pariwisata dapat berupa partisipasi langsung maupun tidak langsung. Partisipasi langsung dapat berupa pemanfaatan peluang pasar dalam bentuk usaha-usaha yang terkait dengan kegiatan pemasaran sarana penunjang pariwisata. Sehingga pengembangan obyek pariwisata akan dapat memberi penghasilan terhadap masyarakat sekitarnya, dengan demikian akan dapat meningkatkan pendapatan mereka. Sedangkan partisipasi yang tidak langsung dapat berupa pemeliharaan situasi dan kondisi obyek wisata yang aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah dan penuh kenangan sehingga dapat mendorong wisatawan berkunjung ke lokasi tersebut dan tinggal lebih lama. Sehingga dengan demikian dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk membuka lapangan kerja baru berupa pelayanan terhadap kebutuhan wisatawan selama tinggal di obyek wisata tersebut.

Pembangunan pariwisata pada hakekatnya adalah upaya untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh suatu daerah yang berupa obyek dan daya tarik yang terwujud, antara lain kekayaan alam yang indah, keanekaragaman flora dan fauna, keanekaragaman bentuk kesenian maupun tradisi serta peninggalan sejarah dan purbakala. Pariwisata merupakan bentuk ekspor yang

dianggap menguntungkan terutama bidang ekonomi Nasional, disamping masyarakat di suatu Negara. Menurut J. Spillane, keinginan untuk meningkatkan kegiatan di bidang pariwisata antara lain disebabkan beberapa faktor sebagai berikut:

1. Makin berkurangnya peranan minyak sebagai penghasil devisa jika dibandingkan dengan waktu yang lalu.
2. Merosotnya nilai-nilai ekspor di sektor non migas
3. Prospek pariwisata yang tetap memperlihatkan kecenderungan secara konsisten.
4. Besarnya potensi yang kita miliki bagi pengembangan pariwisata di Indonesia.¹

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang memiliki begitu banyak keanekaragaman budaya, penduduk, serta keindahan alamnya merupakan potensi yang besar untuk pengembangan pariwisata. Oleh karena itu sektor pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan yang penting untuk dikembangkan karena tidak selamanya Indonesia dapat bergantung pada sektor migas sebagai sumber devisa utama.

Alasan sektor pariwisata dipacu untuk dijadikan komoditi andalan disamping migas sebagai komoditi pendukung kelangsungan pembangunan nasional, antara lain adalah:

¹.James Spillane, *ekonomi Pariwisata dan Prospeknya*, Kanisius. Yogyakarta, 1985, hal. 57

1. Pola perjalanan wisata di dunia yang terus menerus meningkat dari tahun ke tahun .
2. Pariwisata tidak begitu terpengaruh gejolak ekonomi dunia, disamping pertumbuhannya yang lebih cepat daripada pertumbuhan ekonomi dunia.
3. Meningkatnya kegiatan ekonomi daerah dan pengaruh ganda dari pengembangan pariwisata tampak lebih nyata.
4. Komoditi pariwisata tidak mengenal proteksi atau *quota* seperti komoditi lainnya.
5. Potensi pariwisata Indonesia yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia yang beranekaragam macamnya tidak akan habis terjual.
6. Pariwisata sudah menjadi kebutuhan hidup manusia pada umumnya.²

Agar sektor pariwisata dapat menjalankan perannya sebagaimana yang diharapkan pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat umum menjadi salah satu prasyarat untuk mencapai keberhasilan pembangunan. Pembangunan pariwisata dalam kegiatannya hampir menyentuh seluruh segi kehidupan masyarakat dan merupakan kegiatan yang sangat dipengaruhi dan memerlukan dukungan masyarakat ataupun umum yang terkoordinasi.

Dalam kondisi yang demikian , maka dapat disimpulkan bahwa faktor manusia merupakan hal yang pokok dalam menentukan berhasil

² Gamal Suwanto, *Dasar-Dasar Pariwisata*, Penerbit ANDI, Yogyakarta, 2004, hal. 25.

dan tidaknya suatu tujuan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam kaitanya dengan hal tersebut F. Siagian berpendapat:³

“Sesungguhnya pada analisa terakhir persoalan administrasi adalah persoalan manusia. Tidak ada kegiatan yang dapat berlangsung tanpa manusia, terlepas dari lengkapnya fasilitas, besarnya biaya yang tersedia, modernnya perlengkapan dan majunya ilmu pengetahuan serta mutakhirnya teknologi”

Pendapat yang lain dikemukakan oleh Indra wijaya sebagai berikut:

“Manusia dan hanya manusia satu-satunya yang merupakan sumber utama organisasi yang tidak bisa digantikan oleh teknologi apapun. Bagaimana baiknya organisasi, lengkapnya sarana dan prasarana fasilitas kerjasama tidak akan mempunyai arti tanpa ada manusia yang mengatur, menggunakan dan memelihara.”⁴

Kedua pendapat diatas tersebut, menunjukkan bahwa pentingnya kedudukan manusia. Karena itu, merupakan tuntutan yang mutlak bagi semua jajaran pemerintah untuk lebih meningkatkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, agar dapat menunjukkan citranya yang bermutu dalam membantu tugas-tugas pemerintah. Seperti yang telah diungkapkan oleh Stear bahwa:

³ Sondang P. Siagian, *Peranan Staff Dalam Manajemen*, Gunung Agung, Jakarta, 1980, hal.5.

⁴ Adam I. Indra Wijaya, *Prilaku Organisasi*, Sinar Baru, Bandung. 1986, hal. 27.

“Hasil yang dicapai oleh suatu organisasi adalah tergantung dari kerja masing-masing pegawai”⁵

Setiap daerah tujuan wisata (destinasi) dituntut untuk mampu meningkatkan mutu sumber daya manusia, karena sesungguhnya kualitas SDM inilah yang diyakini secara langsung akan menentukan mutu produk dan pelayanan wisata. Artinya, peningkatan kualitas SDM menjadi salah satu kunci untuk memenangkan persaingan global yang semakin kompetitif, prasarat untuk itu adalah sistem pendidikan dan pelatihan kepariwisataan yang mendukung, penyusunan dan penerapan standar kompetensi tenaga pariwisata.

Harus diakui bahwa birokrasi merupakan stakeholder pariwisata dan karena itu memiliki peran yang sangat strategis untuk menentukan arah dan sasaran pembangunan pariwisata. Peran ini semakin sentral karena dalam era otonomi daerah kewenangan didalam perencanaan, implementasi dan pengelolaan pariwisata diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah. Implikasinya tentu saja sangat luas terutama pada kesiapan birokrasi di daerah dalam mengimplementasikan kewenangan baru tersebut. Implikasi lainnya adalah bahwa keberhasilan pembangunan kepariwisataan nasional pada akhirnya sangat tergantung pada kemampuan birokrasi di daerah untuk mengelola sumber daya pariwisata.

⁵ Ibid, hal. 195.

Dalam kebijakan pembangunan daerah, pemerintah Kabupaten Banjarnegara menetapkan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan yang mendorong pembangunan di Kabupaten Banjarnegara. Kontribusi yang dapat diandalkan pada pembangunan ekonomi Kabupaten Banjarnegara pada sektor pariwisata, diantaranya industri pariwisata dan jasa-jasa, dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat yang secara langsung mampu meningkatkan pendapatan asli daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut Pemerintah Banjarnegara melakukan pengembangan-pengembangan kawasan-kawasan obyek wisata yang ada di Kabupaten Banjarnegara.

Salah satu obyek wisata andalan di Kabupaten Banjarnegara adalah Dataran Tinggi Dieng yang merupakan kawasan bersama milik Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo. Berdasarkan RIPP Jawa Tengah Kawasan Dataran Tinggi Dieng merupakan salah satu Kawasan wisata andalan di Propinsi Jawa Tengah.

Dataran Tinggi Dieng (*Dieng Plateau*) yang terletak disebelah timur laut kota Banjarnegara 55 Km, merupakan daerah tujuan wisata No 2 di Jawa Tengah setelah Borobudur. Seperti kita ketahui bahwa Dataran Tinggi Dieng ini memiliki beberapa objek wisata yang cukup menarik dan memiliki potensi untuk dikembangkan agar menjadi wisata andalan yang menarik penambahan pemasukan pendapatan daerah.

Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng yang 90% wilayahnya berada di Kabupaten Banjarnegara terdapat wisata budaya dan wisata alam berupa panorama yang menarik, dimana pada era 90an pernah mencapai kunjungan sebanyak 132.415 wisatawan, dan selanjutnya terjadi penurunan hingga tahun 2006 yang hanya terdapat kunjungan 57.766 wisatawan.

Aset wisata di Dataran Tinggi Dieng antara lain 8 buah candi, yaitu candi Arjuna, Gatot kaca, Srikandi, Dwarawati, Banowati, Bima dan Puntadewa. Candi-candi tersebut merupakan bangunan suci yang dahulu digunakan sebagai tempat pemujaan dan asrama pendidikan Hindu tertua di Indonesia. Aset wisata lain yang tersebar di Dataran Tinggi Dieng adalah: Kawah Sikidang, Kawah Sibanteng, kawah Sileri, kawah Candradimuka, telaga Balaikambang, telaga Merdada, Telaga Siwi, telaga Dringa, telaga Sinila, Sumur Jalatunda, Goa Junut, gangsiaran Aswotomo dan museum Purbakala, serta berbagai kesenian, budaya dan pemandangan alam lainnya. Dataran tinggi Dieng merupakan obyek wisata pegunungan yang menyajikan pemandangan alam yang memukau, hamparan hutan jati, kawah-kawah yang masih aktif, serta udara yang sejuk membuat kawasan obyek wisata berkesan damai dan tenang.

Dataran Tinggi Dieng terletak tepat di perbatasan antara Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo, wilayah terbesar dimiliki oleh Kabupaten Banjarnegara, merupakan dataran paling tinggi

di Jawa yang terletak pada ketinggian 2,093 m diatas permukaan laut dengan suhu rata-rata 15 derajat celcius dan 10 derajat celcius pada malam hari. Pada musim kemarau, suhu dapat turun drastis di bawah titik nol derajat celcius. Luas Dataran Tinggi Dieng 619,846 hektar, dikelilingi gugusan gunung antara gunung sumbing, gunung Sindoro, gunung Perahu, gunung Rogojembangan serta gunung Bismo. Keindahan Dieng menawarkan suatu sensasi menarik, percaya atau tidak pengunjung yang datang dari arah wonosobo dapat menyaksikan dua kali matahari terbit. Matahari terbit Dieng di beri julukan sebagai Golden Sunrise, dengan warna matahari keemasan dan Silver Sunrise dengan warna sinar matahari putih perak. Penampilan matahari yang pertama atau golden Sunrise, dapat dilihat dari menara pandang dengan ketinggian 1.700 meter diatas permukaan laut, lokasi sebelum memasuki kawasan desa Dieng, sedangkan penampilan kedua atau silver Sunrise, dapat disaksikan dari komplek candi hindu. Ada kenangan khas yang bisa dibawa bila berkunjung ke Dieng antara lain: Kacang Dieng, manisan buah carika, Asparagus, jamur Dieng, kripik kentang dan ramuan purwaceng sebagai penghangat badan.

Dalam upaya pengembangan dan pemeliharaan obyek-obyek wisata di Kawasan Dataran Tinggi Dieng dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara. Dinas Pariwisata

dan Kebudayaan terbentuk berdasarkan Perda Kabupaten Banjarnegara No 6 tahun 2004 merupakan dinas teknis daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintah kabupaten di bidang perencanaan, pengelolaan dan pengembangan obyek dan daya tarik wisata, sarana, jasa pemasaran dan kebudayaan serta urusan ketatausahaan dinas. Sedangkan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kawasan Dataran Tinggi Dieng (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan program kerja, penelitian, pengkajian, pembinaan dan bimbingan, pengawasan dan evaluasi, pengelolaan dan pengembangan Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Penulis tertarik meneliti Peran dari Dinas pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara, karena penulis melihat bahwa Dataran Tinggi Dieng memiliki beberapa obyek wisata yang berpotensi untuk di kembangkan dan perlu mendapat perhatian dari pemerintah dalam upaya pengembangannya.

Namun pada kenyataannya, secara umum pengelolaan dan pengembangan obyek wisata Dataran tinggi Dieng dalam realitanya

belum sesuai yang di harapkan. Menyikapi hal tersebut pemerintah kabupaten Banjarnegara dalam pengembangan pariwisata telah melakukan upaya pengembangan obyek wisata Dataran tinggi Dieng dengan melengkapi sarana dan prasarana penunjang yang diharapkan dapat menarik pengunjung atau wisatawan, misalnya penambahan dan pembangunan sarana dan prasarana serta upaya perbaikan akses pendukung seperti jalan menuju kawasan wisata dan transportasinya serta sarana-sarana yang sekiranya bisa mendukung berkembangnya pariwisata di Dataran Tinggi Dieng yang di harapkan dapat menjadikan daya tarik tersendiri bagi para pengunjung baik dari dalam maupun luar negeri.

Tabel 1.1
Jumlah Pengunjung Obyek Wisata Dataran Tinggi Dieng Tahun 2004-2007

No.	Tahun	Wisman	Wisnus	Jumlah
1	2004	4920	66857	71777
2	2005	5695	62680	68385
3	2006	11238	46528	57766
4	2007	2874	70833	73707

Sumber data: Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara

Melihat data diatas, dari tahun ke tahun jumlah kunjungan ke obyek wisata Dataran tinggi Dieng mengalami penurunan, kecuali pada tahun terakhir yakni pada tahun 2007 terjadi kenaikan jumlah pengunjung. Menurut keterangan dari ibu Supri Hastuti, Penurunan

jumlah pengunjung di sebabkan karena terjadinya penurunan pengunjung secara global di Indonesia akibat adanya bencana alam, pengeboman di berbagai daerah di Indonesia, konflik dimana-mana serta situasi politik dan keamanan yang kurang kondusif yang kemudian berpengaruh terhadap menurunnya minat wisatawan dari dalam maupun luar negeri untuk berkunjung ke daerah tujuan wisata.⁶

Pada tahun 2007 obyek wisata di Dataran Tinggi Dieng mengalami kenaikan jumlah pengunjung dengan adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mendukung kepariwisataan di Dataran Tinggi Dieng, seperti penyelenggaraan showbiz di obyek wisata dan pelaksanaan event-event kunjungan pada pekan lebaran di kawasan wisata, kegiatan penanaman seribu pohon kerjasama Pecinta alam dengan Ormas dan Perhutani, penyelenggaraan festival kesenian daerah dan lain-lain. Dengan meningkatnya jumlah pengunjung pada obyek wisata Dataran Tinggi Dieng diharapkan secara langsung dapat memberikan kontribusi yang signifikan pada peningkatan pendapatan daerah melalui pajak maupun retribusi dari kawasan wisata tersebut.

Akan tetapi dalam pengembangan pariwisata di Dataran Tinggi Dieng terdapat berbagai kendala yang dihadapi yaitu berkaitan dengan keterbatasan pembiayaan kepariwisataan dan pemeliharanya

⁶ Wawancara Dengan Ibu Supri Hastuti, Pegawai Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara. Pada Hari Rabu, 27 Februari 2008.

menyebabkan potensi obyek wisata dan penunjangnya belum bisa sepenuhnya dikembangkan secara optimal, Pola dan strategi pemasaran belum maksimal dilaksanakan, belum memadainya sarana dan prasarana pariwisata, lemahnya manajemen kepariwisataan dan lemahnya kualitas sumber daya manusia serta kurangnya keterpaduan peran masyarakat dengan pemerintah serta swasta dalam kerjasama mengembangkan kepariwisataan di Kabupaten Banjarnegara.

Melihat dari latar belakang masalah tersebut, maka kajian skripsi ini adalah bagaimana Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara dalam upaya pengembangan Obyek Wisata Dataran Tinggi Dieng. Dengan mengambil judul **“PERAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANJARNEGARA JAWA TENGAH DALAM MENGEMBANGKAN KAWASAN WISATA DATARAN TINGGI DIENG TAHUN 2004-2007”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan judul dan latar belakang tersebut di atas, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:
“Bagaimanakah Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah Dalam Mengembangkan kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng Tahun 2004-2007?”

C. Tujuan Dan Manfaat penelitian

1. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah Dalam Mengembangkan Obyek Wisata Dataran Tinggi Dieng Tahun 2004-2007.

2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan kebijakan pengembangan atau pembangunan pariwisata.
- b. Sebagai sumber informasi dan masukan bagi ilmu pengetahuan kepariwisataan dan penelitian sejenis pada masa yang akan datang.
- c. Mengetahui peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke lokasi Obyek Wisata Dataran Tinggi Dieng.

D. Kerangka Dasar Teori

Kerangka dasar teori adalah teori-teori yang digunakan dalam melakukan penelitian sehingga kegiatan ini menjadi jelas, sistematis dan ilmiah. Sebelum penulis mengemukakan teori-teori apa saja yang digunakan dalam penelitian ini, ada baiknya bila penulis mengemukakan definisi teori terlebih dahulu. Definisi teori menurut Singarimbun:

“Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, abstrak, definisi dan preposisi untuk menerangkan suatu fenomena alam yang menjadi pusat perhatiannya”⁷

Sedangkan Teori menurut Koentjoroningrat adalah:

“Teori adalah merupakan pernyataan mengenai hubungan positif antara gejala-gejala yang teliti dalam satu atau beberapa faktor tertentu dalam masyarakat”⁸

Dari beberapa teori di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya teori merupakan sarana pokok yang menyatakan hubungan yang sistematis antara fenomena sosial maupun alami yang hendak diteliti. Sedangkan landasan pemikiran yang digunakan sebagai kerangka dasar atau pijakan dalam penelitian ini adalah meliputi hal-hal sebagai berikut:

3 Peran

Peran adalah turut serta dan ikut memikul tanggung jawab akan keberhasilan pembangunan yang secara jelas telah disebutkan dalam GBHN dengan kalimat kalimat sebagai berikut:

“Partisipasi aktif segenap masyarakat dalam pembangunan harus semakin meluas dan merata baik dalam memikul beban pembangunan maupun dalam pertanggungjawaban atas pelaksanaan pembangunan”⁹

⁷ Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Sur vey*, LP3ES, Jakarta, 1989, hal.4.

⁸ Koentjoroningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, PT. Gramedia, Jakarta, 1991, hal. 11.

⁹ *GBHN*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1999, hal. 5.

Peran menurut Astrid S. Sukanto adalah:

“ Role/peran merupakan dinamika dari status atau penggunaan dari hak dan kewajiban atau bisa disebut juga status obyektif. Antara peranan dan status saling berkaitan satu sama lainnya. Karena status merupakan kedudukan yang memberi hak dan kewajiban, sedangkan kedua unsur tersebut tidak ada artinya kalau tidak dipergunakan.¹⁰

Peranan Astrid S. Susanto sedikitnya mengandung tiga hal, yaitu:

- 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau kedudukan seseorang dalam masyarakat . Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peranan adalah suatu konsep perilaku yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasinya.
- 3) Peranan dapat juga diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial.¹¹

Dari ketiga hal tersebut yang terpenting adalah interaksi antar seseorang dalam menjalankan suatu peranan yang ada disekitarnya. Ketika interaksi berlangsung dalam kelompok masyarakat, maka individu yang dapat memberi pelayanan lebih serta memiliki ganjaran sosial lebih sedikit akan cenderung menentukan interaksi. Dengan

¹⁰ Phil Astrid S. Susanto, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, Bina Cipta, Jakarta, 1985, hal. 7.

¹¹ Ibid, hal. 195.

kata lain individu/kelompok lainnya, dimana itu mempunyai kekuasaan , selain kekayaan dan kehormatan ada juga unsur lain yaitu pengetahuan serta ketrampilan yang diperoleh secara periodik.

Peran menurut Soejono soekamto:

“Aspek dinamis dari seseorang pada kedudukan (status), jadi bila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban, maka ia menjalankan perannya”¹²

Dari pengertian-pengertian tersebut dikatakan bahwa peran yang dijalankan sangat ditentukan oleh status atau kedudukan yang dijabatnya. Apabila seseorang atau suatu obyek berperilaku sesuai atau melaksanakan hak-hak dan kewajiban karena kedudukan atau statusnya, maka ia telah menjalankan peran yang dijalankan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kabupaten Banjarnegara, dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan, aktifitas-aktifitas sedemikian rupa sebagai upaya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

Peran ini, oleh Dinas pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara, dirumuskan dalam suatu program, yang diharapkan dapat membantu dan mempermudah mencapai tujuan yang telah ditentukan . Program-program pengembangan yang dilakukan adalah: Promosi pariwisata, pameran pada event nasional dan regional,

¹² Soerjono Soekamto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, CV. Rajawali, Jakarta, 1992, hal. 225.

pembangunan fasilitas atau sarana penunjang di kawasan obyek wisata, pemilihan duta wisata dll.¹³

3 Pariwisata

a. Pengertian Pariwisata

Menurut UU No. 9 tahun 1990 tentang kepariwisataan. Istilah pariwisata berhubungan erat dengan pengertian wisata, yaitu kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata. Sedangkan pengertian dari pariwisata itu sendiri adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusaha obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dengan bidang tersebut.

Pendapat lain mengenai pariwisata juga dikemukakan oleh Oka A. Yoeti, yaitu: “Pariwisata adalah pengalaman mendatangi atau mengunjungi dari satu tempat ke tempat lain yang bersifat sementara, yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok sebagai usaha untuk mencari keseimbangan atau keserasian serta kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial dan budaya alam”

Hal itu jelas menggambarkan bahwasanya pariwisata juga kegiatan yang melibatkan emosi seseorang, dimana emosi tersebut

¹³ Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara.

bersifat spontanitas dan bersifat sementara dengan kata lain ekspresi dari tiap individu berlainan cara dan bentuk penampilannya. Hal demikian juga berkaitan dengan apa yang dimaksud sebagai perwujudan manusia tentang perwujudan hidup serta sosial budaya dan sejarah.

b. Manfaat pariwisata

Manfaat pariwisata didalam pembangunan mencakup beberapa segi, yaitu:

1). Segi Ekonomi

Bahwa perkembangan pariwisata merangsang tumbuhnya usaha-usaha ekonomi tertentu yang saling menunjang. Dalam istilah teknisnya hal tersebut dinyatakan dapat memperluas dasar-dasar perekonomian suatu Negara.

2). Segi Seni dan Budaya

Salah satu dorongan kebutuhan manusia untuk mengunjungi suatu daerah adalah memenuhi rasa keingintahuan , mengagumi atau menyelami seni budaya di daerah yang dikunjungi.

3). Pemeliharaan dan Pemanfaatan Lingkungan hidup

Pengembangan pariwisata harus tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup sehingga dari pengembangan potensi pariwisata diharapkan segala kekayaan dan keindahan

alam dapat dilestarikan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya sebagai salah satu daya tarik wisatawan. Pengembangan pariwisata yang tidak teratur dan terarah dapat merusak lingkungan hidup, sebaliknya apabila dibina secara baik justru menjadi pendorong pemeliharaan lingkungan alam yang terlantar. Wisatawan yang mempunyai tujuan untuk rekreasi menginginkan daerah yang menimbulkan suasana baru dari kebisingan kehidupan sehari-hari.

4). Memperluas nilai-nilai Pergaulan hidup dan Pengetahuan

Hubungan-hubungan yang terjalin antara wisatawan dengan masyarakat yang dikunjungi sedikit banyak akan menimpa nilai-nilai baru dalam arti memperluas cakrawala pandangan pribadi terhadap nilai-nilai kehidupan lain, serta penyerapan pengetahuan baru.

5) Memperluas Kesempatan Kerja

Industri Pariwisata merupakan industri yang sifatnya menyerap kebutuhan tenaga kerja, tidak hanya mementingkan mesin-mesin saja. Sebagai industri yang sifatnya melayani maka disamping membutuhkan unsure cepat, cepat, mudah dan nikmat juga ramah. Apabila rangkaian tenaga itu dilengkapi dengan tenaga kerja pada industri penunjang pariwisata seperti perusahaan kerajinan, dekorasi hotel, toko

souvenir dan sebagainya, maka jumlah tenaga kerja yang diserap makin banyak lagi.

6). Menunjang perbaikan Kesehatan dan Prestasi Kerja

Manusia selalu menginginkan terlepas dari kejenuhan, kesibukan hidup sehari-hari atau rasa bosan dengan mendambakan suasana baru, lingkungan baru walaupun hanya untuk sementara waktu”¹⁴

c. Sasaran Pariwisata

Pada dasarnya sasaran pariwisata itu ditujukan pada masyarakat umum tanpa memandang status sosialnya dan juga bagi masyarakat yang membutuhkan suasana yang lain atau yang baru dari rutinitas sehari-hari. Sasaran pariwisata bagi masyarakat umum ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1) Bagi wisatawan dalam negeri atau wisatawan domestik

Sasaran pariwisata ini khusus ditujukan bagi masyarakat didalam negeri itu sendiri.

2) Bagi masyarakat luar negeri atau wisatawan mancanegara

Sasaran pariwisata ditujukan bagi wisatawan mancanegara agar mereka tertarik untuk datang berkunjung. Tentunya dengan menonjolkan kelebihan suatu obyek wisata.

¹⁴ Oka A. Yoety, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Angkasa, Bandung, 1985, hal. 15.

d. Obyek Wisata

Menurut UU RI No.9 tahun 1990, obyek dan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata. Pendapat lain tentang definisi dari obyek wisata adalah:

“Obyek wisata merupakan perwujudan ciptaan manusia, tata hidup seni budaya, sejarah bangsa, tempat atau keadaan alam yang mempunyai daya tarik yang dikunjungi wisatawan.”¹⁵

Sehingga dapat disimpulkan obyek wisata adalah suatu tempat yang memiliki daya tarik dan bisa dikunjungi serta dinikmati keindahannya oleh manusia.

e. Pengembangan Pariwisata

Sektor Pariwisata di Indonesia merupakan suatu usaha industri yang perlu dikembangkan, sejalan dengan besarnya pendapatan atau devisa Negara yang diperoleh dari sektor satu ini. Pendapat ini apabila kita analisis lebih jauh tentang Inpres No.9 tahun 1969 pasal 3. Adapun isinya sebagai berikut: “Usaha pengembangan pariwisata di Indonesia bersifat suatu pengembangan industri pariwisata dan merupakan bagian dari usaha pengembangan dan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat dan Negara”.¹⁶

¹⁵ Direktorat Jendral Pariwisata, *Pengantar Pariwisata Indonesia*, Jakarta, 1976, hal. 29.

¹⁶ Kamus Istilah Pariwisata.

Pengembangan sektor pariwisata tidaklah untuk mencapai satu tujuan tetapi banyak sekali tujuan yang hendak dicapai. Menurut inpres diatas pula tujuannya terbagi atas tiga point, yaitu:

1. Meningkatkan pendapatan devisa pada khususnya dan pendapatan Negara dan masyarakat pada umumnya serta perluasan lapangan industri lainnya.
2. Memperkenalkan dan mendayagunakan keindahan alam dan kebudayaan Indonesia.
3. Meningkatkan persaudaraan dan persahabatan Nasional dan Internasional.

Pengembangan pariwisata di suatu daerah erat kaitanya dengan pembangunan perekonomian suatu daerah atau Negara. Pengembangan pariwisata akan selalu memperhitungkan keuntungan dan manfaat bagi rakyat banyak. Alasan pengembangan pariwisata tersebut sebagai mana dikemukakan oleh Yoety, yaitu:

“Pengembangan pariwisata pada suatu daerah tujuan wisata baik secara lokal, regional atau ruang lingkup nasional pada suatu Negara sangat erat kaitanya dengan pembangunan perekonomian daerah atau Negara tersebut. Dengan perkataan lain, pengembangan kepariwisataan pada suatu daerah tujuan wisata selalu akan diperhitungkan dengan keuntungan dan manfaat bagi rakyat banyak”.

Pengembangan pariwisata itu lebih banyak bersifat non ekonomis. Wisatawan yang datang berkunjung pada suatu daerah tujuan wisata salah satu motivasinya adalah untuk menyaksikan dan melihat keindahan alam dan termasuk didalamnya cagar alam, kebun raya, tempat bersejarah dan candi-candi, bangunan-bangunan kuno, perkebunan dan sawah ladang.

Pariwisata perlu dikembangkan untuk menghilangkan kepicikan berfikir, mengurangi salah pengertian, dapat mengetahui tingkah laku orang lain yang berkunjung, terutama bagi masyarakat dimana proyek kepariwisataan dibangun.

Dengan alasan pengembangan pariwisata pada suatu daerah tertentu tersebut diharapkan pada pengambil kebijakan hendaklah sebelum melakukan penelitian atau pengkajian terhadap aspek yang berkaitan dengan pariwisata tersebut. Mulai dari potensi yang dimiliki daerah tersebut, kebiasaan hidup masyarakat disekitarnya, kepercayaan yang dianutnya, sampai dengan tingkah laku atau kebiasaan yang direncanakan akan ditarik untuk berkunjung ke daerah tersebut.”¹⁷

¹⁷ Anonim Kumpulan Bidang Kepariwisata, Dinas Pariwisata Jateng, 1985, hal. 15.

Pengembangan pariwisata dapat dilakukan dengan:

a. Pengembangan obyek-obyek wisata

Pengembangan obyek wisata ini dapat dilakukan pada dua segi, yaitu:

1). Dari segi fisik

a). Membangun sarana dan prasarana pariwisata di lokasi obyek wisata.

b). Melengkapi sarana dan prasarana wisata yang sudah ada di lokasi wisata.

2). Dari segi non fisik

a) Meningkatkan pelayanan kepada para pengunjung, dengan meningkatkan sumber daya manusia sebagai pengelola obyek wisata.

b) Memunculkan kebudayaan-kebudayaan yang ada di daerah sehingga dapat dinikmati oleh para pengunjung.

c) Memperhatikan sesuatu yang khas yang ada di daerah seperti makanan khas dan kerajinan khas.

b. Promosi

Disamping melalui pengembangan obyek wisata, dalam pengembangan kepariwisataan pemerintah daerah juga perlu melakukan promosi-promosi tentang pariwisata yang ada di daerahnya. Dengan adanya promosi, maka orang-orang atau

wisatawan akan mengetahui dengan jelas tentang obyek-obyek wisata yang ada pada suatu daerah atau Negara, juga tentang kelebihan-kelebihan suatu daerah. Jadi, dengan adanya promosi, diharapkan daerah tersebut dapat dikenal oleh masyarakat luas, baik tentang keindahan, kebudayaan maupun kekhasannya.¹⁸

3 Pemerintah Daerah

a. Pengertian Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah menurut Mariun adalah:

“Suatu bentuk daripada pemerintahan setempat dalam nama kepada masyarakat setempat diberikan kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri”¹⁹

Pembentukan pemerintah daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Disamping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal. Untuk itu pembentukan pemerintah daerah harus mempertimbangkan beberapa faktor seperti kemampuan ekonomi, potensi daerah, wilayah daerah, luas daerah, kependudukan dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta pertimbangan dan syarat lain yang memungkinkan daerah itu

¹⁸ Oha A. Yoety. *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*, PT. Prandnya Pariwisata, Jakarta

¹⁹ Mariun, *Asas-Asas Ilmu Pemerintahan*, UGM, Yogyakarta, 1985, hal. 45.

dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya daerah dan diberikannya otonomi daerah.

Menurut UU No 32 tahun 2004 yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah “Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang” Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia”²⁰

Pemberian kedudukan Propinsi sebagai daerah otonom dan sekaligus sebagai wilayah administrasi dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:²¹

- Untuk memelihara hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dalam kerangka Negara kesatuan Republik Indonesia.
- Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang bersifat lintas daerah Kabupaten dan Daerah Kota serta melaksanakan

²⁰ *Undang-undang Otonomi Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007, hal. 4,5

²¹ Dedi Supriadi. Brata Kusuma, Phd, Padang Solihin, MA. *Otonom Penyelenggara Pemerintah Daerah*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 2001, hal.13

kewenangan otonomi daerah yang belum dapat dilaksanakan baik di daerah Kabupaten dan daerah Kota.

- Untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan tertentu yang dilimpahkan dalam rangka pelaksanaan asas- asas dekonsentrasi.

b. Pembagian Daerah menurut UU No. 32 tahun 2004

Dalam hal pembagian daerah menurut Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, yang menjadi pertimbangan adalah:

- 1). Faktor kemampuan ekonomi
- 2). Faktor potensi daerah
- 3). Faktor luas wilayah
- 4). Faktor kependudukan dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta pertimbangan dan syarat lain yang memungkinkan daerah itu dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya daerah dan diberikannya otonomi daerah.

Daerah dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dan dekonsentrasi adalah daerah propinsi, sedang daerah yang dibentuk berdasar asas desentralisasi adalah daerah Kabupaten dan daerah Kota. Daerah yang dibentuk berdasarkan asas

desentralisasi berwenang untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan atas prakarsa sendiri berdasar aspirasi masyarakat.

1). Daerah Propinsi

Daerah Propinsi sebagai daerah otonom juga berkedudukan sebagai wilayah administrasi, terdiri dari wilayah darat dan wilayah laut sejauh 12 mil laut diukur dari garis pantai kearah laut lepas dan arah perairan laut.

2). Daerah Kabupaten dan Daerah Kota

Daerah Kabupaten dan Daerah Kota bersifat otonom, yaitu daerah yang dibentuk berdasar asas desentralisasi, berwenang untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan atas prakarsa sendiri berdasar aspirasi masyarakat.

3). Kecamatan

Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota. Kecamatan yang menurut Undang-undang No. Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di Daerah, sebagai wilayah administrasi dalam rangka dekonsentrasi, dan menurut undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, kedudukanya diubah menjadi perangkat daerah Kabupaten dan Daerah Kota.

4). Kelurahan atau Desa

Kelurahan atau wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten dan atau Daerah Kota dibawah Kecamatan. Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut lurah.

Otonomi daerah mengandung makna beralihnya sebagian proses pengambilan keputusan dalam perencanaan , pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dari pusat ke daerah. Perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan ini memerlukan reorientasi/perubahan peran dan fungsi pemerintah sesuai yang dijelaskan dalam undang-undang tentang pemerintah daerah. Pemerintah bertanggung jawab secara lebih penuh terhadap kebijakan-kebijakan dasar yang diperlukan bagi pembangunan daerah, khususnya yang menyangkut pembangunan sarana dan prasarana, investasi (dan akses terhadap sumber dana), kebijakan lingkungan dan pengembangan sumber daya manusia.

Salah satu masalah yang muncul berkaitan dengan penyelenggaraan otonomi daerah adalah kesiapan daerah dalam merealisasikan otonomi daerah itu sendiri. Ketergantungan daerah akan subsidi dari pusat relatif besar, oleh karena itu upaya menggali dan menciptakan sumber-sumber pendapatan asli daerah untuk

meningkatkan pendapatan daerah menjadi tantangan bagi pemerintah daerah setempat.

Di era otonomi daerah, efektifitas pemerintah daerah dalam memicu perkembangan ekonomi daerah akan sangat bergantung pada:

- Kemampuan berafiliasi, yaitu kemampuan kerjasama, negosiasi dan networking dengan pihak swasta (dalam negeri dan asing), dengan pemerintah daerah lain, institusi dan pemerintah pusat.
- Kemampuan berpikir strategik, yaitu kemampuan melihat dan mengidentifikasi faktor-faktor dominan dari suatu daerah, yang akan mempengaruhi dan menentukan pembangunan daerah.
- Sikap kreatif dan inovatif di tingkat pemerintah daerah, yaitu kemampuan untuk menciptakan gagasan-gagasan dan pemikiran baru yang berdampak pada kemajuan ekonomi daerah.

Pembangunan ekonomi daerah bukanlah monopoli dan tanggung jawab pemerintah daerah. Pembangunan ekonomi daerah melibatkan multisektor dan pelaku pembangunan , sehingga diperlukan kerjasama dan koordinasi diantara semua pihak yang berkepentingan. Pemerintah daerah di setiap tingkat harus bisa menjadi fasilitator yang dapat memadukan kepentingan berbagai pihak dan meletakkan dasar-dasar kepentingan bersama.

Memperhatikan berlakunya desentralisasi pembangunan dan otonomi daerah terjadi beberapa perubahan dan pergeseran

kewenangan dalam perencanaan pembangunan Nasional termasuk juga sektor pariwisata. Semua tanggung jawab pelaksanaan program-program pembangunan dilakukan oleh pemerintah daerah pada tingkat kabupaten/ kota yang meliputi kewenangan di bidang pengembangan obyek daerah tujuan wisata (ODTW), infrastruktur dan sumberdaya manusia.

Urusan Pariwisata yang di atur oleh pemerintah daerah meliputi :

- a. Urusan obyek wisata, sepanjang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akan berlaku tidak menjadi hukum urusan pusat
- b. Urusan pramuwisata
- c. Urusan perhotelan
- d. Urusan penginapan remaja
- e. Urusan pondok wisata
- f. Urusan perkemahan
- g. Urusan Rumah makan
- h. Urusan Bar
- i. Urusan Mandala Wisata
- j. Urusan Kawasan Wisata
- k. Urusan usaha kreasi dan hiburan umum
- l. Urusan promosi pariwisata daerah

Apabila diperhatikan tentang komposisi beban dan tanggung jawab pelaksanaan pembangunan pemerintah kabupaten/kota sesungguhnya mempunyai kewenangan yang strategis dalam pengelolaan dan pengembangan potensi sumber daya yang dimiliki daerah.

c. Kebijakan Pemerintah Daerah bagi pengembangan pariwisata

1. Menganalisis potensi pariwisata daerah serta mengkaji faktor-faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi pengembangan pariwisata daerah. Daerah harus dapat mengidentifikasi kombinasi atraksi budaya yang menjadi kekuatan daerah dan yang akan dijadikan prioritas pengembangan pariwisata daerah
2. Kebijakan pengembangan kombinasi atraksi budaya daerah diselaraskan dengan pemangunan regional secara keseluruhan serta perencanaan tata ruang propinsi
3. Pengembangan infrastruktur daerah yang menunjang pengembangan sektor pariwisata bekerjasama dengan pihak swasta. Infrastruktur daerah : fasilitas perhubungan , sarana pendidikan bagi tenaga kerja industri pariwisata, infrastruktur dasar bagi pengembangan atraksi wisata potensial yang berlaku di daerah terpencil

4. Promosi budaya dan wisata bekerja sama dengan pihak swasta dan asosiasi-asosiasi pariwisata. Jika daerah mengalami keterbatasan dana , kegiatan promosi budaya dapat memanfaatkan promosi melalui pasar wisata
5. Kebijakan pelestarian dan pemeliharaan sumberdaya alam yang sangat penting bagi pengembangan pariwisata daerah, seperti : pantai, sungai, hutan dengan melibatkan pihak swasta dan masyarakat
6. Kebijakan pengembangan peluang bisnis dan investasi asing pariwisata yang dapat dilakukan langsung oleh pemerintah daerah dengan adanya otonomi daerah , termasuk kebijakan-kebijakan yang bersifat teknis seperti pemberian ijin investasi di daerah
7. Kebijakan pengembangan usaha kecil menengah pariwisata; mendorong kemitraan dengan usaha besar dalam negeri dan asing, mengadakan fasilitas-fasilitas terpadu (pelatihan, penyediaan fasilitas keuangan, pemasaran, teknis, pengembangan sumber daya manusia)
8. Kebijakan untuk mengakses sumber dana bagi calon investor, terutama calon investor menengah dan kecil dengan penekanan pada kelayakan usahanya. Memberikan informasi/ penjelasan

tentang berbagai skim kredit yang tersedia dan lembaga pendamping untuk dapat mengakses sumber dana tersebut

9. Kebijakan pengembangan sumber daya manusia, khususnya perhatian diberikan pada pengembangan sumber daya manusia di sektor-sektor/ keahlian yang dibutuhkan sesuai dengan prioritas dan kekuatan daerah. Termasuk kedalam prioritas pengembangan sumber daya manusia adalah pengembangan wirausaha dalam bentuk pendidikan/ pelatihan ketrampilan formal maupun informal
10. Kebijakan mendorong pariwisata mancanegara dan mendorong kerjasama antar kota, sister cities.

Berhubungan dengan pengembangan pariwisata yakni Obyek Wisata Dataran Tinggi Dieng kewenangan sepenuhnya berada di tangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara dalam mengelolanya diserahkan kepada Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan sebagai pelaksana. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip pemberian otonomi yang salah satu isinya menyatakan bahwa pelaksanaan otonomi daerah harus dapat meningkatkan kemandirian daerah otonom dan karenanya Daerah Kabupaten dan Daerah Kota tidak ada lagi wilayah Administrasi. Demikian pula di kawasan-kawasan khusus yang dibina oleh pemerintah atau pihak-pihak lain, seperti badan otorita, kawasan pelabuhan, kawasan perumahan, kawasan

pertambangan, kawasan kehutanan, kawasan perkebunan, kawasan perkotaan, kawasan pariwisata, dan sebagainya berdasarkan ketentuan peraturan Daerah Otonom.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara ini merupakan Dinas bentukan daerah, atau unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten yang bertanggung jawab kepada daerah secara penuh. Dan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Banjarnegara melalui sekretaris daerah.

Dalam pemerintahan daerah Banjarnegara, posisi Dinas pariwisata dan kebudayaan adalah sebagai dinas penghasil, yang mana pemasukan atau pendapatan dari sektor pariwisata menjadi tumpuan pemerintah daerah kabupaten Banjarnegara, dan sebagai dinas yang diandalkan bisa menjadi penyangga PAD Kabupaten Banjarnegara.

Maka dari itu, peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara dalam mengembangkan obyek-obyek wisata di Banjarnegara terutama Obyek Wisata Dataran tinggi Dieng sangat berarti bagi perkembangan dan pembagunan di Kabupaten Banjarnegara.

E. Definisi Konsepsional

Definisi konsepsional yaitu suatu pengertian dari kelompok atau gejala yang menjadi pokok perhatian. Adapun pengertian konsepsional dalam pembahasan ini adalah :

1. Peran adalah perilaku atau aktifitas yang dilakukan seseorang di dalam kelompok organisasi atau organisasi yang menduduki posisi tertentu dalam rangka membina, membimbing, mengawasi dan mengembangkan semua pelaksanaan tugas-tugasnya disertai dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai aturan yang berlaku demi tercapainya tujuan yang ditentukan.
2. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah dinas teknis daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintah kabupaten di bidang perencanaan, pengelolaan dan pengembangan obyek dan daya tarik wisata, sarana, jasa pemasaran dan kebudayaan serta urusan ketatausahaan dinas di Kabupaten Banjarnegara.
3. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan oleh daerah dan DPRD menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Obyek wisata merupakan perwujudan ciptaan manusia, tata hidup seni budaya, sejarah bangsa, tempat atau keadaan alam yang mempunyai daya tarik yang dikunjungi wisatawan.

5. Pengembangan pariwisata adalah pembangunan obyek wisata alam dan budaya agar dapat dinikmati oleh wisatawan domestik maupun wisatawan asing. Disamping itu pengembangan obyek wisata ini juga dimaksudkan untuk melestarikan panorama dan budaya Indonesia serta usaha memperbesar, menyempurnakan dan memperbaiki yang telah ada.

F. Definisi Operasional

Peran Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara dalam mengembangkan Obyek Wisata Dataran Tinggi Dieng Tahun 2004-2007

Program Pengembangan Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara adalah meliputi :

- a. Program Pembangunan Fisik dalam mengembangkan Obyek Wisata Dataran Tinggi Dieng
- b. Program Pembangunan Non Fisik dalam mengembangkan Obyek Wisata Dataran Tinggi Dieng.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini akan digunakan metode deskriptif atau analisa kualitatif. Metode Deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu obyek wisata, suatu kondisi,

suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, fluktuatif dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

2. Unit Analisis

Yang menjadi sumber informasi atau sumber data dalam penelitian ini adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara, yang meliputi:

- a. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara.
- b. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara.
- c. Karyawan atau pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini diambil di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara, karena Dinas ini mempunyai peran yang sangat penting dalam upaya pengembangan dan pemeliharaan obyek-obyek wisata yang ada di Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng.

4. Alasan Pemilihan Lokasi

Mengingat banyaknya potensi wisata yang ada di Kabupaten Banjarnegara, khususnya Obyek Wisata Dataran Tinggi Dieng yang menjadi salah satu obyek wisata andalan Kabupaten Banjarnegara ternyata belum dikelola dengan maksimal. Dengan dilandasi semangat otonomi daerah, tentunya dituntut kemandirian dalam mengembangkan dan mengelola aset-aset atau potensi sumberdaya sektor pariwisata daerah.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menuju kebenaran hipotesis diperlukan data yang obyektif. Adapun data tersebut diperoleh dengan cara :

a. Observasi

Adalah metode pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan secara sistematis fenomena-fenomena yang ada baik secara langsung maupun tidak langsung.

b. Dokumentasi

Adalah cara pengumpulan data dengan mengutip data yang diperlukan penulis yang tersedia di kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara.

c. Wawancara

Adalah dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan langsung kepada responden.

6. Teknik Analisis Data

Analisa data yang digunakan yaitu analisa deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah data yang dikumpulkan itu berupa data studi kasus dan monografis, mudah diklasifikasikan dan jumlahnya sedikit.

Dengan menggunakan teknis analisa data yang didapat didalam penelitian (lapangan) tidak lagi dianalisis dengan menggunakan rumus-rumus (angka-angka) tetapi data yang diperoleh tersebut diinterpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian. Prosedur/langkah dalam pengumpulan data kali ini sampai pada pengambilan generalisasi adalah sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan data atau informasi dilapangan yang bersifat primer atau sekunder, bersifat kualitatif/kuantitatif.
- b. Memeriksa data yang telah diperoleh di lapangan.
- c. Menyusun klasifikasi informasi yang didalam data yang diperoleh.
- d. Mendekripsikan sekaligus menganalisa dan menginterpretasikan.
- e. Mengambil kesimpulan.